



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

I. DATA PRIBADI

- Nama** : ASEP MULYAMAN
- Jabatan** : KEPALA SUKU DINAS
- NHK** : 201142

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **5.291.123.000**

- Tanah dan Bangunan Seluas 129 m2/138 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 802.881.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 97 m2/77 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 554.652.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 905 m2/369 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG , HASIL SENDIRI Rp. 1.969.280.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 148 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 1.964.310.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **271.500.000**

- MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
- MOTOR, YAMAHA NMAX SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
- MOTOR, VESPA P.150 S Tahun 1980, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
- MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 235.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **58.250.575**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **155.831.898**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp.

Rp.

5.776.705.473

III. HUTANG

Rp.

2.115.634.875

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

3.661.070.598

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.